

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM RANGKA MENGATASI PENGANGGURAN DI ERA PANDEMI COVID-19

Andries Lionardo

University of Sriwijaya, Palembang, Indonesia
email: andrieslionardo@fisip.unsri.ac.id

Abstrak

Tuntutan dan aspirasi masyarakat akan kebutuhan kerja yang semakin besar di era pandemi covid 19 ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan harus menjadi agenda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari pola sentralisasi yang bersifat paternalistik menjadi desentralisasi sebagai sebuah kemitraan. Oleh karena itu perlu upaya mewujudkan good governance and clean government dalam penyelenggaraan negara yang didukung dengan prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme dan demokratis dalam mengatasi krisis kesehatan yang terjadi. Negara Indonesia sebagai negara agraris haruslah dipandang sebagai suatu negara yang tangguh. Sektor ekonomi harus menjadi sentral kebijakan bagi sektor lainnya. Sektor ini tidak boleh lagi hanya berperan sebagai aktor pembantu apalagi figuran bagi pembangunan nasional. Sektor publik harus menjadi sektor moderen, efisien dan berdaya saing, dan tidak boleh dipandang hanya sebagai katup pengaman untuk menampung tenaga kerja tidak terdidik yang melimpah ataupun penyedia pangan yang murah agar sektor industri mampu bersaing dengan menyediakan tenaga kerja yang handal.

Keywords: Kebijakan Publik, Ekonomi Politik, Pengangguran

Pendahuluan

Terpuruknya sistem ekonomi politik di masa pandemi covid 19 ini mempunyai dampak berkepanjangan hingga saat ini sehingga merapuhkan fundamental ekonomi kita yang kurang bersandar kepada potensi sumberdaya domestik. Pengalaman pahit krisis moneter dahulu kala memberikan bukti empiris bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling tangguh menghadapi terpaan yang pada gilirannya memaksa kesadaran publik untuk mengakui bahwa sektor pertanian merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan sektor andalan dan pilar pertahanan dan penggerak ekonomi nasional. Kekeliruan mendasar selama ini karena sektor pertanian hanya diperlakukan sebagai sektor pendukung yang mengemban peran konvensionalnya dengan berbagai misi titipan yang cenderung hanya untuk mengamankan kepentingan makro yaitu dalam kaitan dengan stabilitas ekonomi nasional melalui swasembada beras dalam konteks ketahanan pangan nasional. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kontribusinya terhadap kebutuhan pangan dan bahan baku industri berbasis pertanian.

Dalam kondisi di atas sesungguhnya stabilitas nasional ini sangatlah dibebankan kepada tenaga

kerja yang sebagian besar masih tetap berada di dalam perangkap keseimbangan lingkaran kemiskinan jangka panjang. Seharusnya kebijakan kesempatan kerja yang harus dibangun adalah berwujud pertanian modern yang tangguh, efisien yang dikelola secara profesional dan memiliki keunggulan memenangkan persaingan di pasar global baik untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (sumber devisa). Untuk itu paradigma pembangunan pertanian yang menekankan pada peningkatan produksi semata harus bergeser ke arah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani dan aktor pertanian lainnya dengan sektor agroindustri sebagai sektor pemacunya (leverage factor).

Kajian Pustaka

Pengangguran dapat diatasi dengan upaya industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi politik sektor kebijakan publik. Pertama, industrialisasi yang mengandalkan industri berbasis luas (broad-based industry). Kedua, industri berteknologi canggih dan rumit (hi-tech industry) dan bernilai tambah tinggi. Ketiga, industrialisasi berbasis pertanian yang didukung pertanian tangguh (agro-industry). Dengan demikian pengembangan agroindustri tidak hanya ditujukan untuk pengembangan kegiatan agroindustri itu sendiri, tetapi sekaligus untuk mendorong kegiatan budidaya (on-farm agribusiness) dan kegiatan-kegiatan lain dalam sistem agribisnis secara keseluruhan melalui efek multiplier (direct, indirect and induced). Hal ini dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pencapaian berbagai tujuan pembangunan. Wujud Agroindustri yang kuat dan maju mempunyai ciri antara lain, (a) Berdaya saing tinggi dan bertumpu pada sumberdaya manusia industrial yang berkualitas dan kemampuan perusahaan teknologi yang tinggi sehingga mampu menghasilkan produk unggulan yang bernilai tambah tinggi, (b) Struktur industri yang kukuh dan seimbang dengan keterkaitan yang erat, baik antar industri maupun antar sektor industri dengan sektor lainnya, sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap gejolak perubahan, (c) Industri yang semakin tersebar keseluruh wilayah tanah air dengan memanfaatkan potensi sumberdaya dan posisi geografis Indonesia secara serasi sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan akses ke pasar dunia, (d) Industri kecil dan menengah yang berkembang semakin andal sebagai tulang punggung pembangunan industri, terutama industri kecil dan menengah sebagai pemasok dan penopang industri unggulan, (e) Prasarana fisik dan kelembagaan yang andal dan mendukung kelangsungan proses inovasi serta pembangunan industri yang berwawasan lingkungan (Yustika : 2005).

Kondisi di atas terjadi seiring dengan munculnya neo-liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan diberlakukannya WTO (World Trade Organization) bagi negara maju dan negara berkembang. Menurut Madeley dan Solagral (dalam Yustika, 2005) liberalisasi perdagangan adalah proses pengurangan dan pada akhirnya penghapusan semua hambatan tarif dan non-tarif secara sistematis antar negara sebagai mitra dagang. Ide liberalisasi ini sejalan dengan pemikiran neoklasik yang menghendaki kegiatan ekonomi berjalan lewat mekanisme pasar, karena hanya dengan model seperti itulah efisiensi alokasi ekonomi internasional akan terjadi. Jadi mudah dipahami apabila ide globalisasi ini sejak awal banyak didukung oleh negara maju (kapitalis) karena secara ekonomi sangat menguntungkan mereka, walaupun pada akhirnya hampir seluruh

negara, termasuk negara ber-kembang, ikut menyetujuinya. Kecenderungannya ekonomi Indonesia berkembang terlepas dari basis sumberdaya yang ada. Industri dikembangkan dengan dasar relokasi dari luar yang mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap barang modal dan bahan baku impor yang justru menguras sumber devisa.

Perubahan sistem ekonomi politik yang digulirkan seharusnya tidak bisa meninggalkan sektor pertanian yang menjadi kegiatan ekonomi yang paling banyak digeluti rakyat. Selama ini dimensi kebijakan makro yang memperhatikan sektor pertanian melemah dalam kurun waktu lebih dari dua dekade setelah swasembada beras. Mungkin karena merasa ekonomi nasional dapat didukung oleh sektor industri walaupun tanpa disadari berkembang dengan fondasi yang rapuh. Pada hakekatnya pertanian adalah sumber utama dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi bahkan sebagai batu penjuru (cornerstone) dari pengurangan kemiskinan. Revitalisasi kebijakan pertanian perlu ditekankan pada peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran pertanian (market driven) dengan meningkatkan (a) akses terhadap teknologi dan pengetahuan, (b) akses pengusaha dan petani terhadap kapital, (c) kapasitas jaringan komoditi untuk memfasilitasi perluasan perdagangan.

Revitalisasi kesempatan kerja berbasis sektor pertanian tidaklah dapat dilakukan secara singkat, tetapi perlu serempak dan komprehensif dan melibatkan pendukung penting seperti infrastruktur, pembiayaan, perdagangan dan pemasaran, penyuluhan dan pengembangan SDM (Arifin, 2007). Oleh karenanya, petani miskin yang merupakan pelaku ekonomi dengan jumlah terbesar harus diberdayakan, bukan "diperdaya". Sejalan dengan itu kebijakan keliru yang dibuat pemerintah selama ini cenderung berimplikasi pada meredupnya daya saing sektor pertanian Indonesia, terlebih ketika kebijakan tersebut tunduk pada hukum-hukum persaingan internasional yang tidak berpihak kepada petani. Misalnya, kebijakan yang memajak pertanian dalam rangka memperoleh surplus yang lebih besar secara implisit dan eksplisit telah terbukti "counter productive" untuk mendorong pertumbuhan dan penyediaan kesempatan kerja. Demikian pula kebijakan pangan murah sangat buruk dalam jangka panjang. Dengan berkembangnya iklim liberalisasi perdagangan dan investasi tersebut telah menyebabkan Indonesia harus mengijinkan impor berbagai komoditi pertanian tanpa bea masuk atau bea masuk rendah yang nyaris menghancurkan pasar dalam negeri komoditi-komoditi pertanian Indonesia

Diagnosis ekonomi politik tentang kinerja atau fenomena ekonomi pembangunan. Metode dan kerangka diagnosis umumnya dipengaruhi oleh pola pikir atau mazhab (school of thoughts) yang dianut seorang peneliti. Salah satunya adalah diagnosis yang menggunakan tiga pilar atau indikator utama dalam ekonomi politik, seperti ikhtiar atau kegiatan bersama (collective actions), kelembagaan (instutions), dan ketidaksempurnaan pasar politik (Yustika, 2005). Pilar pertama adalah ikhtiar bersama, yang merujuk pada tingkatan atau sejauh mana proses pembangunan ekonomi melibatkan proses interaksi seluruh aktor yang terlibat dalam pembangunan ekonomi. Kata kuncinya disini adalah kualitas kinerja governance dari masing-masing aktor, yaitu dari kelompok masyarakat bisnis, masyarakat politik, dan masyarakat madani. Pada negara yang memiliki struktur governance yang baik, peran seluruh aktor menjadi sangat setara dan seimbang. Tidak ada yang merasa paling dominan atau yang memiliki privileges tertentu untuk

memaksakan kehendaknya atau kepentingan kelompoknya sendiri. Bahkan, tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa ikhtiar bersama yang demikian menjadi salah satu indikator proses demokratisasi dalam kebijakan ekonomi.

Perbedaan pendapat yang berkembang dalam proses kebijakan publik merupakan dinamika tersendiri dalam proses demokrasi ekonomi. Pilar kedua adalah kelembagaan, suatu norma, sistem nilai, Konvensi, aturan main balik yang tertulis maupun tidak tertulis. Relevansi pilar kelembagaan disini adalah dalam hal suatu kepentingan ekonomi serta kredibilitas komitmen suatu pemerintahan. Dalam hal yang paling sederhana, pilar kelembagaan termasuk cara masyarakat politik memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengusulkan atau menyetujui perubahan kebijakan. Pilar ini dapat berlaku umum pada sistem demokrasi presidensial dan pada sistem parlementer. Maksudnya, komitmen atau janji para politisi semasa masa kampanye tetap menjadi rujukan utama dalam membangun suatu indikator kinerja kebijakan pembangunan. Pilar ketiga yaitu adanya pasar politik yang tidak lain merujuk pada sistem pemilihan umum, atau rekrutmen politik para pejabat publik. Kepedulian para ahli ekonomi politik adalah tentang sistem informasi dan kredibilitas pemimpin politik yang menjadi determinan utama tingkat ketidaksempurnaan pasar politik. Apabila rakyat banyak sebagai pemilih atau pemberi suara dalam sistem ekonomi politik memiliki informasi tentang komitmen atau program yang ditawarkan seorang pemimpin, rakyat dikatakan turut berkontribusi bagi ketidaksempurnaan pasar politik. Demikian pula, unsur kredibilitas seorang calon pemimpin menjadi sangat penting, terutama menyangkut karakter pribadi dan kelompok, kinerjanya (track record) sebelum atau selama menjadi pejabat publik, serta tingkat kredibilitasnya dalam menyampaikan dan mewujudkan janji-janjinya selama kampanye politik. Apabila konsistuen menginginkan pembangunan keberpihakan yang lebih baik terhadap sektor pangan dan pertanian, politisi atau tepatnya perumus kebijakan amat perlu untuk memperjuangkannya. Alasan yang sangat rasional adalah karena sang politisi masih ingin dihormati rakyatnya dan terpilih dalam suatu pemilihan umum, yang tidak lain adalah suatu skema kontrak sosial yang lebih akrab (Arifin, 2007).

Pembahasan

Struktur Kebijakan Publik di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi politik kebijakan publik di Indonesia dibungkus oleh bingkai pembangunan liberalisasi pertanian. Tanpa mengenal kelas, liberalisasi telah memporak-porandakan struktur sosial ekonomi politik dan ideologi, serta menggantikannya dengan struktur baru yang dibangun menurut proses produksi yang sesungguhnya menguntungkan pihak ketiga (kapitalis). Implementasi pembangunan tersebut telah berlangsung lama dan traumatik bagi masyarakat. Struktur masyarakat kapitalis yang dibentuk tersebut dibungkus dalam bentuk kolonial, yang berpijak di atas dominasi politik dari luar. Salah satu sifat yang paling penting dari liberalisasi sektor pertanian di Indonesia adalah dominasi politik dan ekonomi oleh negara serta modal asing, dibandingkan dengan modal dalam negeri dan tenaga kerja.

Rrezim Orde Baru dengan bantuan kekuatan pemodal asing berhasil melakukan gebrakan-gebrakan ekonomi pada struktur makro, walaupun pada tingkat mikro mengalami kebobrokan yang luar biasa. Kebijakan publik berhasil meraih swasembada pangan, ini berarti kebutuhan

pangan massa rakyat Indonesia bisa tercukupi seluruhnya. Bahkan mampu mengekspor beras ke beberapa negara. Prestasi ini patut kita beri apresiasi, sebab selama berpuluh-puluh tahun bangsa kita harus terus-menerus mengimpor beras. Akan tetapi waktu itu kita telah terlena dengan prestasi tersebut, kita tidak sadar bahwa politik pertanian kita adalah politik beras, jadi standar kecukupan pangan hanya dilihat dari stok beras yang ada. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah bahwa belum seluruh areal pertanian dipacu untuk memperoleh produktivitas maksimal. Akibatnya kondisi ini hanya berlangsung beberapa tahun saja, selebihnya kita terpaksa mengimpor beras kembali, serta harus tunduk pada aturan perdagangan internasional. Kondisi ekonomi politik sektor pertanian Indonesia yang berhadapan dengan liberalisme kebijakan ekonomi makro baik fiskal, moneter, investasi maupun perdagangan yang kurang, telah menyebabkan kebijakan tersebut sama sekali tidak memihak dan mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian. Kebijakan yang diterapkan terlalu bias perkotaan, jasa dan industri, seperti otomotif, petrokimia, tekstil, baja, properti, dll dan terus mendorong proses konglomerasi yang merapuhkan fondasi perekonomian nasional.

Kebijakan mengatasi pengangguran percepatan pembangunan pertanian di negeri ini tidak mampu melampaui bangsa-bangsa lain. Namun demikian, sebagai bangsa yang besar dalam artian populasi penduduk dan potensi sumberdaya alam, belum terlalu terlambat untuk mereposisi dan mendesain strategi dan kebijakan nasional guna meraih dan mewujudkan pertanian industrial modern yang tangguh dan berkelanjutan. Menyimak fenomena tersebut, dituntut adanya perubahan pola pikir yang mendasar (*mindset change*) dari elite politik dan birokrat selaku pengambil keputusan. Tanpa sektor agribisnis yang modern dan tangguh dengan daya saing yang tinggi, fundamental perekonomian negara akan sangat rapuh dan lamban berkembang menuju industrialisasi dalam perspektif jangka panjang. Dampak Neo-Liberalisme terhadap Kebijakan Pertanian Pelaksanaan paham neo-liberalisme adalah penghilangan peran negara. Dalam pemerintahan Orde Baru, arah kebijakan pembangunan atau yang lebih di kenal dengan *developmentalis*, sebenarnya sudah bercorak kapitalistik. Serta selama tigapuluh tahun terakhir sudah ada gejala bagaimana sebenarnya pembangunan ekonomi kita memang diarahkan pada kebebasan pasar.

Adanya pengenalan Revolusi Hijau oleh William S. Goud (USAID), haruslah dipahami sebagai usaha untuk memajukan sektor pertanian. Bahkan secara ekonomi, konsep ini adalah cara cepat membawa ke arah kesejahteraan rakyat, khususnya dalam pengembangan kebijakan pertanian. Revolusi hijau merupakan modernisasi tata cara pengelolaan kebijakan pertanian. Namun demikian, tidaklah mudah mencapai kemajuan dalam memproduksi hasil pertanian. Adanya gerakan neo-liberalisme akan menciptakan Kemajuan produksi yang bukan didorong oleh semangat menyejahterakan diri tetapi oleh keterpaksaan ekonomi dan atmosfer ketakutan global. Dampak neo-liberalisasi tentunya akan menghasilkan pemahaman bahwa upaya modernisasi pertanian ini sangat bergantung pada suplai bahan-bahan impor. Hal ini tentu saja menimbulkan sistem pasar yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan internasional, dan ini sangat berpengaruh pada produksi pertanian, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pasar yang di kendalikan oleh kekuatan ekonomi neoliberal berdampak sekali pada proses produksi pertanian, misalkan biaya produksi lebih besar dari harga jual produk pertanian. Karena dalam hukum pasar bebas negara dilarang untuk campur tangan maka petani-petani sering merugi dari tahun-ketahun. Akhirnya mereka merelakan lahannya sebagai pengganti hutang, atau pengganti modal. Kondisi demikian, tentunya akan mempengaruhi dan menciptakan kegagalan revolusi hijau, dan program-program sektor pertanian.

Upaya pemerintah adalah bagaimana menyiapkan dan memperbaiki nasib petani dengan menyediakan kebutuhan lahan, cara pertanian yang terkoneksi langsung dengan industri dan pasar yang memang dikendalikan untuk petani dan hasil-hasil pertaniannya. Di Indonesia, angin segar perbaikan kondisi nasib petani belum begitu dirasakan. Pemerintah belum membuat kebijakan yang berpihak kepada petani. Momentum reformasi, lebih banyak diwujudkan melalui model-model perlawanan rakyat (petani) terhadap ketimpangan penguasaan agraria dan sumber-sumber pertanian yang ada didalamnya, misalnya dengan demonstrasi dan pendudukan terhadap perkebunan-perkebunan yang ditelantarkan oleh pemerintah. Disisi lain, proses keabsahan hak secara hukum juga tidak diprioritaskan oleh pemerintah sehingga terjadi konflik besar dan panjang yang melibatkan masyarakat petani dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Adanya regulasi yang dibuat oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007 dan Pembaharuan sistem Agraria Nasional tahun 2006, sebenarnya merupakan upaya pemerintah dalam merevitalisasi kebijakan sektor pertanian. Sayangnya, substansi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan petani, karena indikasi penguasaan aset-aset agraria masih mencerminkan spirit ekonomi Neo-Liberal. Bukan pembaharuan atau revolusi agraria sejati untuk kesejahteraan rakyat. Adanya penetapan Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Sumber Daya Air dan beberapa aturan hukum yang lain justru menciptakan marjinalisasi terhadap kepentingan petani dalam menggarap perkebunan. Hal tersebut terbukti dengan masih sulitnya upaya hukum untuk mencabut HGU perusahaan yang menelantarkan perkebunannya. Begitu pula dengan Undang-Undang Sumber Daya Air, juga masih banyak memberikan fasilitas pada perusahaan-perusahaan air mineral ketimbang memfasilitasi atau memperbaiki sistem irigasi untuk petani. Dalam kondisi demikian, pembangunan pertanian yang kuat akan menjadi mustahil jika terjadi liberalisasi agraria dan penguasaan aset-aset didalamnya secara kapitalistik. Hal tersebut menjadi buruk, takala adanya pengurangan peranan birokrasi dalam sistem ekonomi politik kebijakan pertanian di Indonesia.

Tidak terjadinya hubungan produksi yang harmonis antara negara dan petani telah memberikan dampak dan preseden buruk bagi kebijakan pertanian dibuat pemerintah. Petani sebagai kelompok masyarakat yang tertindas nyaris terbelenggu dalam kepentingan dan kekuatan asing. Secara kontekstual, pasar bebas sangat berpengaruh terhadap pola baru, dimana perusahaan-perusahaan besar beramai-ramai untuk memproduksi bibit-bibit dan pupuk berlabel organik. Akibatnya Petani juga tetap menjadi konsumen yang seharusnya produsen. Jika diruntut, hal tersebut telah terjadi dari zaman kolonial yang memformat liberalisasi agraria sebagai bentuk penghancuran pada kekuasaan feodal di Indonesia. Sehingga, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini masih menganut rezim ekonomi neoliberalisasi yang tentunya akan menyebabkan lemahnya sektor kesempatan kerja. Dengan model kebijakan tersebut, kebijakan pemerintah dengan menghadirkan aturan-aturan yang pro pasar bebas telah menciptakan keterbatasan kepemilikan lahan dan tidak tersedianya perencanaan produksi dan mekanisme pasar yang dikuasai sektor swasta. Akhirnya, mimpi akan kesejahteraan petani tidak lah akan terwujud.

Kebijakan Publik dan Liberalisasi

Efektivitas Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasi Pengangguran di Era Pandemi Covid 19 diharapkan memiliki kekayaan alam terbesar nomor lima di dunia, seharusnya ditentukan oleh kemajuan pertaniannya. Sektor pertanian, seharusnya menjadi prime mover perekonomian nasional sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang hidupnya tergantung kepada sektor pertanian. Tapi, ironisnya hal itu seperti hanya sekedar impian dan hanya sekedar retorika dari pengambil kebijakan di negara ini. Namun realitasnya, banyak kalangan menilai bahwa RPPK ini merupakan tindakan dan "kebijakan yang gagal" dan tidak lebih

hanya sebatas pemenuhan janji kampanye nya yang hampir tidak terealisasi. Terbukti dimana kita masih gagal dalam manajemen ketahanan pangan. Kebijakan ekonomi politik pertanian belum mendukung kepentingan pembangunan sektor pertanian karena terlalu bias ke sektor industri manufaktur, jasa dan perkotaan. Ini jelas terlihat baik dalam konteks moneter, fiskal, perdagangan maupun industri. Walaupun ekonomi Indonesia berbasis agraris akan tetapi tidak mempunyai Bank Pertanian, tidak memiliki pabrik alat dan mesin pertanian yang mampu mendorong mekanisasi pertanian, dan dukungan terhadap temuan teknologi tinggi di bidang pertanian sangat lamban khususnya rekayasa bioteknologi, upaya pengembangan industri hasil pengolahan sangat tidak memadai.

Setelah swa-sembada pangan (beras) yang dicapai oleh Orde Baru pada tahun 1984, kebijakan makro pembangunan ekonomi sektor pertanian langsung melompat (jumping-up) dari pertanian tradisional kepada "broad base and hi-tech industry" dan tahapan agro-based industri diabaikan atau dilewati. Kebijakan ini merupakan suatu kekeliruan yang mendasar karena tidak sesuai dengan kajian teoritik. Adanya arus liberalisasi atau permainan politik bisnis internasional telah menciptakan ketergantungan bangsa Indonesia yang sangat tinggi kepada negara-negara maju sehingga diperoleh Efektivitas Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasi Pengangguran di Era Pandemi Covid 19. Padahal negara-negara maju sekalipun hingga saat ini masih mensubsidi pertaniannya dan sangat protektif terhadap produk pertaniannya sebagai cerminan nasionalisme yang tinggi. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Indonesia ini merupakan buah kekeliruan desain dari strategi dan perangkat kebijakan ekonomi makro yang dilakukan dengan pendekatan neoklasik. Kondisi ini jelas tidak dapat dipisahkan dari visi serta derajat pemahaman ekonomi politik pertanian para pembuat keputusan.

Adanya free trade dan integrasi perekonomian tersebut telah mendorong mobilitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan global melakukan penekanan pergerakan modal usaha skala kecil di negara berkembang. Akibatnya, disintegrasi perekonomian riil berlangsung dibawah panji reformasi ekonomi makro dari sistem finansial global yang sangat tidak stabil. Ada ketidakadilan dari globalisasi yang berimplikasi kepada rakyat untuk membebaskan aliran modal (investasi), tenaga kerja dan teknologi tanpa batas negara, antara negara kuat dengan negara lemah dan miskin. Padahal seharusnya birokrasi perdagangan global dan lembaga pembiayaan internasional seharusnya tidak mempunyai kewenangan melebihi negara atau pembuat keputusan nasional. Pluralis dimasa yang akan datang dalam manajemen ekonomi dunia harus berpihak kepada masyarakat, jangan dijadikan komoditi bagi kapitalis tetapi kepada petani pihak pemilik sektor pertanian. Oleh karenanya, sangat diperlukan upaya atau agenda pembatasan kepentingan neo-liberalisme.

Dalam perkembangannya, liberalisasi dalam rangka Efektivitas Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasi Pengangguran di Era Pandemi Covid 19 masuk dalam agenda perundingan pada Putaran Uruguay, yang menghasilkan tiga aspek kesepakatan utama, yakni mempermudah akses pasar, mengurangi subsidi domestik, dan memperluas kompetisi ekspor. Akses pasar hendaknya bertujuan meningkatkan transparansi kebijakan proteksi yang ada dan mem-fasilitasi penurunannya, serta membuka pasar domestik. Kebijakan subsidi domestik harus bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dengan mempromosikan kemajuan teknis dan pemanfaatan optimum faktor produksi, terutama tenaga kerja. Kotak hijau (green box) meliputi kebijakan subsidi yang tidak berpengaruh atau berpengaruh sangat kecil terhadap distorsi perdagangan atau produksi. Subsidi jenis ini bebas digunakan dan tidak perlu pengurangan. Misalnya, program pelayanan pemerintah seperti pene-litian, pelatihan, penyuluhan, pelayanan

pemasaran dan promosi, infrastruktur, kepemilikan saham publik untuk tujuan ketahanan pangan, bantuan pangan domestik, subsidi langsung kepada petani yang tidak berhubungan dengan volume produksi dan decoupled income support. Negara berkembang harus dibebaskan dari pengurangan subsidi untuk investasi pertanian, subsidi input bagi petani berpenghasilan rendah, dan subsidi untuk mendorong diversifikasi dari tanaman ilegal. Sedangkan kebijakan kompetisi ekspor bertujuan untuk mengurangi subsidi ekspor, yaitu kemungkinan mengekspor produk pertanian dengan harga yang lebih rendah daripada harga domestik. Negara tidak boleh mem-pertahankan subsidi ekspor mereka yang sudah ada, tapi tidak diperkenankan memperkenalkan program baru. Sedang negara berkembang harus mengurangi subsidi ekspor.

Kondisi di atas, menunjukkan bahwa liberalisasi pertanian menawarkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, liberalisasi memungkinkan terpuruknya kepentingan petani karena kekalahan dalam persaingan liberal, namun di sisi lain berpotensi mening-katkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ke-miskinan. Untuk memanfaatkan peluang dan memini-mumkan dampak negatif tersebut, banyak hambatan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik dari sisi internasional maupun domestik. Penghapusan atau minimisasi subsidi domestik di negara maju, penghapusan tariff escalation, dan trans-paransi peraturan sanitary and phitosanitary akan menyebabkan Indonesia memiliki bargaining power yang lemah dalam memperjuangkan kepentingan petani. Dengan demikian liberalisasi sesungguhnya bisa membuat Efektivitas Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasi Pengangguran di Era Pandemi Covid 19

Kesempatan Kerja, Pemberdayaan dan Solusinya

Dapatlah dipahami bahwa Efektivitas Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasi Pengangguran di Era Pandemi Covid 19 hingga saat ini masih dapat diandal-kan sebagai sektor yang berperan penting dalam pertum-buhan ekonomi nasional. Sumbangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cukup nyata, terbukti dari cukup besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap GDP (gross domestic product). Namun, sejak badai krisis ekonomi menghantam hampir seluruh negara di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia sektor pertanian menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi krisis tersebut ketimbang sektor lain. Kondisi tersebut juga dapat dilihat, dari adanya berbagai program yang ditujukan untuk memacu sektor pertanian, seperti adanya Kredit Usaha dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Sesungguhnya pengembang-an sektor pertanian di Indonesia memiliki keung-gulan komparatif yang tidak dimiliki oleh negara lain, yakni dengan berlimpahnya sumberdaya pertanian (resource endowment) baik di sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, produk-produk khas daerah tropis dengan jenis buah-buahan eksotis seperti manggis, dan salak. Fokus utama pemerintah adalah bagaimana agar produk-produk pertanian mempunyai keunggulan kompe-titif di pasar Internasional. Namun pertanyaannya adalah apakah upaya peningkatan kualitas produk yang dihasilkan dengan diimbangi reorientasi kebijakan yang melibatkan sektor-sektor terkait lainnva. Oleh karena itu, salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah dimulai dari pelaku-pelaku pertanian itu sendiri yang dimulai dari produsen (baik rumah tangga petani atau pelaku lainnya) dengan diimbangi oleh reorientasi kebijakan pemerintah dalam melihat ekonomi politik kebijakan pertanian. Beberapa langkah strategis yang dapat segera dilakukan pemerintah untuk memperkuat kapasitas ekonomi politik dalam rangka Efektivitas Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasi Pengangguran di Era Pandemi Covid 19.

Kesimpulan

Efektivitas Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasi Pengangguran di Era Pandemi Covid 19 harus dibangun dari kebijakan publik haruslah dilakukan dengan pembaharuan sistem agraria

yang sifatnya korporasi yaitu diberikan sebagai kesempatan kerja. Pembagian lahan secara individu hanya akan mempercepat liberalisasi aset-aset agraria. Dari analisis yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan perlawanan yang dilakukan negara dalam neo-liberalisasi kebijakan pertaniannya, khususnya di Indonesia belum memiliki model kebijakan pertanian yang berbasis kerakyatan yaitu berpikir secara revolusioner dalam memperjuangkan petani. Dalam rangka perbaikan kajian ekonomi politik kebijakan pemerintah di sektor pertanian, khususnya dalam rangka memberikan perlawanan terhadap neo-liberalisasi kebijakan publik yang terjadi, maka setidaknya muncul beberapa pemikiran (rekomendasi) dalam mengimplementasikannya, antara lain pemerintah sebagai aktor kebijakan harus mampu mengubah paradigma berpikir dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan. Paradigma lama yang selalu bertumpu pada produktivitas harus mulai diimbangi dengan upaya-upaya politik yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Efektivitas Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasi Pengangguran di Era Pandemi Covid 19 sebaiknya segera diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan pokok kaum tani. Kebijakan-kebijakan yang merujuk pada liberalisasi di sektor pertanian sebaiknya ditinjau ulang. Pemerintah sebaiknya tidak melegitimasi kebijakan liberalisasi perdagangan di berbagai sektor.

References

- Ancok, Djamaludin, 1999. Revitalisasi Sumberdaya Manusia Dalam Menghadapi Perubahan Pasca Krisis. Jakarta: Workshop Perencanaan dan Pengembangan Sumber Manusia
- Dwiyanto, Agus, 2000. Materi Kuliah Prinsip Administrasi Publik. Yogyakarta: MAP UGM
- Hughes, E, Owen, 1994. Public Management and Administration. USA: St. Martin's, United States of America
- Muluk, M.R. Khairul, 2005. Desentralisasi & Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumadia Publishing
- Osborne, David dan Gaebler, Ted, 1992. Mewirauahakan Birokrasi: mentranformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik jilid 2 (terjemahan). Jakarta: PPM,
- Rasyid, Ryaas, Muhammad, 1997. Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: Yarsif Watampone
- Robbins, Stephen, 1996. Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi (terjemahan). Jakarta: Prenhalindo
- Said, M. Mas'ud, 2007. Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia. Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Siagian, P, Sondang, 1994. Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suryawikarta, Bey, et.al, 1997. Birokrasi di Indonesia. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri
- Tamin, Faisal, 2004. Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta: Penerbit Balantika
- Thoha, Miftah, 1995. Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi. Bogor: Pusdiklat Pegawai Depdiknas.
- Thoha, Miftah, 1997. Birokrasi Publik Abad 21: Agenda Perubahan. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2000. Materi Kuliah Konsep dan Isu Pembangunan. Yogyakarta: MAP UGM
- Widodo, Joko, 2001. Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cedeikia.